

Langgar Standar, 567 SPPG Wilayah I Dihentikan, 450 Baru Pulih Operasional

Updates. - WARTAWAN.ORG

Mar 18, 2026 - 09:16



Harjito, Direktur Pemantauan dan Pengawasan Wilayah I

JAKARTA - Demi memastikan setiap suapan dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG) benar-benar bernutrisi dan aman, Badan Gizi Nasional (BGN) mengambil langkah tegas. Pengawasan diperketat dengan menghentikan sementara operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Wilayah I, mencakup seluruh Sumatera, yang terindikasi belum memenuhi standar ketat yang telah ditetapkan. Tindakan ini bukan sekadar formalitas, melainkan

cerminan keseriusan BGN dalam menerapkan prinsip *zero tolerance* terhadap segala bentuk penyimpangan dalam penyediaan layanan publik yang berkaitan dengan gizi.

Data per Maret 2026 menunjukkan bahwa sebanyak 567 SPPG di Wilayah I sempat terhenti operasionalnya. Langkah ini diambil sebagai bagian dari evaluasi menyeluruh dan upaya korektif. Kabar baiknya, 450 SPPG telah berhasil melakukan pembenahan dan kini kembali melayani setelah dinyatakan memenuhi standar. Namun, masih ada 117 SPPG yang masih dalam proses evaluasi lanjutan.

“Penghentian operasional dilakukan secara terukur dan berbasis indikator evaluasi yang ketat, guna memastikan seluruh SPPG memenuhi standar mutu, keamanan pangan, serta prinsip tata kelola yang akuntabel,” ujar Harjito, Direktur Pemantauan dan Pengawasan Wilayah I, di Jakarta, Rabu (18/3/2026).

Meskipun demikian, BGN masih menahan diri untuk mempublikasikan rincian teknis temuan lapangan secara detail. Proses pendalaman dan verifikasi data masih terus berjalan untuk memastikan keakuratan informasi yang disajikan kepada publik. Ini penting agar objektivitas terjaga dan setiap langkah perbaikan dapat dilaksanakan dengan tepat sasaran.

Lebih dari sekadar sanksi, BGN mengedepankan pendekatan pembinaan yang intensif. Setiap SPPG yang operasionalnya dihentikan diwajibkan menjalani proses pembinaan dan asistensi teknis. Tujuannya jelas, agar mereka dapat segera memenuhi standar yang dipersyaratkan dan kembali beroperasi secara optimal, memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat.

Untuk memperkuat efektivitas pengawasan, BGN juga tengah menggenjot sistem monitoring berbasis wilayah yang terintegrasi. Diharapkan, pendekatan ini mampu mendeteksi dini potensi penyimpangan, menekan risiko pelanggaran berulang, sekaligus mempercepat proses pemulihan operasional SPPG yang sempat terhenti.

“Kami memastikan bahwa setiap pelaksanaan layanan berada dalam koridor standar yang telah ditetapkan. Tidak ada toleransi terhadap praktik yang berpotensi menurunkan kualitas layanan maupun kepercayaan publik,” tegas Harjito, menegaskan kembali komitmen BGN dalam menjaga kredibilitas Program MBG. (PERS)